



Melampaui Positivisme: Krisis Relevansi Epistemologis Penelitian Manajemen Pendidikan Tinggi dan Transformasi Universitas Berbasis Inovasi Sumber Daya Alam Lokal Untuk Pembangunan Sdm Unggul Indonesia 2045

Dany Rakca¹

¹Pasca Sarjana Doktoral, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

*Corresponding author email: dra92arya@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 10, 2026

Approved May 11, 2026

Keywords:

Research Epistemology, Relevance Crisis, Higher Education Management, Local-Based Innovation, Human Capital, Indonesia Emas 2045.

ABSTRACT

Research on higher education management in Indonesia has largely been built upon a positivist paradigm that emphasizes measurability, generalization, and methodological rigor. While this approach has contributed to strengthening academic governance, its relevance is increasingly questioned as universities are expected to play a more active role in socio-economic transformation and the development of high-quality human resources. This article examines the epistemological relevance crisis of the positivist paradigm and proposes a reorientation of higher education management research toward more contextual and transformative approaches. Using a conceptual-critical perspective, the article demonstrates that the dominance of positivism tends to confine the role of universities to that of graduate producers, thereby neglecting their strategic capacity as centers of innovation and creators of economic value based on local natural resource potential. The conceptual findings of this article underscore that the adoption of post-positivist and transformative research paradigms is a prerequisite for strengthening university contributions to the agenda of independent natural resource governance, as articulated in the 2024–2029 Asta Cita Government Program. Consequently, reorienting the research paradigm of higher education management constitutes a crucial foundation for human capital development and the strengthening of nation-building efforts toward Indonesia Emas 2045.

ABSTRAK

Penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia selama ini banyak dibangun di atas paradigma positivisme yang menekankan keterukuran, generalisasi, dan ketepatan metodologis. Meskipun pendekatan tersebut berkontribusi pada penguatan tata kelola akademik, relevansinya semakin dipertanyakan ketika universitas dituntut berperan lebih aktif dalam transformasi sosial-ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia unggul. Artikel ini mengkaji krisis relevansi epistemologis paradigma positivistik serta mengusulkan arah reorientasi penelitian manajemen pendidikan tinggi yang lebih kontekstual dan transformatif. Melalui pendekatan konseptual-kritis, artikel ini menunjukkan bahwa dominasi positivisme cenderung membatasi pemaknaan peran universitas pada fungsi penyedia lulusan, sehingga mengabaikan kapasitas strategis universitas sebagai pusat inovasi dan penciptaan nilai tambah ekonomi berbasis potensi sumber daya alam lokal. Temuan konseptual artikel ini menegaskan bahwa adopsi paradigma penelitian post-positivistik dan transformatif merupakan prasyarat untuk memperkuat kontribusi universitas dalam agenda kemandirian pengelolaan sumber daya alam sebagaimana

diarahkan dalam Asta Cita Pemerintahan 2024–2029. Dengan demikian, reorientasi paradigma penelitian manajemen pendidikan tinggi menjadi landasan penting bagi pengembangan human capital dan penguatan nation building menuju Indonesia Emas 2045.

Copyright © 2026 The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rakca, D. (2026). Melampaui Positivisme: Krisis Relevansi Epistemologis Penelitian Manajemen Pendidikan Tinggi dan Transformasi Universitas Berbasis Inovasi Sumber Daya Alam Lokal Untuk Pembangunan Sdm Unggul Indonesia 2045. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(2), 1554–1566. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i2.5889>

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi semakin diposisikan sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya melalui fungsi pendidikan formal, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap pembentukan kapasitas ekonomi dan sosial bangsa. Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, pendidikan tinggi berperan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan ketahanan ekonomi (Becker, 1993). Dalam konteks Indonesia, visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 menempatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta pengelolaan sumber daya alam bernilai tambah sebagai agenda prioritas pembangunan nasional (Tilaar, 2019; Yamin, 2021). Konsekuensinya, perguruan tinggi dihadapkan pada tuntutan untuk melampaui peran tradisional sebagai institusi penghasil lulusan.

Dari sudut pandang teori organisasi pendidikan tinggi, universitas merupakan institusi berbasis pengetahuan yang memiliki otonomi akademik dan peran sentral dalam produksi ilmu pengetahuan serta inovasi (Clark, 1983). Karakteristik ini membuka ruang bagi universitas untuk berkontribusi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada, tetapi juga pada pembentukan struktur ekonomi baru melalui pengembangan teknologi, kewirausahaan, dan inovasi berbasis konteks lokal. Integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat seharusnya memungkinkan universitas mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor-sektor yang berbasis potensi sumber daya alam daerah (Gibbons et al., 1994).

Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa kontribusi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia masih didominasi oleh kajian yang berfokus pada pengukuran kinerja institusi, efektivitas kepemimpinan, dan kepuasan pemangku kepentingan melalui pendekatan kuantitatif yang bersifat administratif (Fattah, 2019; Prasojo, 2018). Fokus semacam ini cenderung memosisikan universitas sebagai organisasi penyedia tenaga kerja, sehingga peran strategisnya sebagai penggerak inovasi dan pembangunan ekonomi daerah kurang terartikulasikan secara memadai dalam hasil penelitian.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang bersifat epistemologis dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi. Dominasi paradigma positivisme—dengan penekanan pada objektivitas, generalisasi, dan hubungan sebab-akibat linier—membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap kompleksitas universitas sebagai institusi sosial yang sarat nilai, relasi kolegial, dan konteks lokal (Burrell & Morgan, 1979). Dalam kerangka epistemologi post-positivistik, realitas organisasi pendidikan dipahami sebagai fenomena yang bersifat dinamis dan tidak sepenuhnya dapat direduksi ke dalam variabel terukur (Creswell, 2014). Ketergantungan

yang berlebihan pada pendekatan positivistik menyebabkan penelitian manajemen pendidikan tinggi kurang responsif terhadap dinamika inovasi dan perubahan kelembagaan.

Selain itu, kajian yang secara eksplisit mengaitkan paradigma penelitian manajemen pendidikan tinggi dengan peran universitas dalam membangun kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, dan mahasiswa masih relatif terbatas. Padahal, dalam kerangka *Mode 2 knowledge production*, pengetahuan diharapkan dihasilkan melalui interaksi lintas aktor dan diarahkan pada pemecahan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan dunia industri (Gibbons et al., 1994). Ketidakterpaduan kolaborasi tersebut—terutama pada sektor industri berbasis sumber daya alam lokal—berimplikasi pada lemahnya kontribusi riset dan pendidikan tinggi dalam penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan kemandirian ekonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis krisis relevansi paradigma positivistik dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia serta mengajukan reorientasi paradigma penelitian yang lebih kontekstual dan transformatif. Artikel ini mereposisi universitas sebagai pusat inovasi dan penciptaan nilai tambah ekonomi berbasis potensi sumber daya alam lokal melalui kepemimpinan akademik dan kolaborasi lintas aktor. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi analisis epistemologis, teori organisasi pendidikan tinggi, dan agenda pembangunan *human capital* ke dalam satu kerangka konseptual yang mendukung kemandirian ekonomi nasional. Sebagai artikel konseptual, tulisan ini mengajukan sebuah model konseptual sebagai respons terhadap krisis paradigma positivisme dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual-kritis yang bertujuan menganalisis secara reflektif paradigma epistemologis yang mendominasi penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia serta implikasinya terhadap transformasi peran universitas dalam pembangunan nasional. Pendekatan konseptual dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis empiris atau pengukuran hubungan kausal antarvariabel, melainkan pada pengembangan argumen teoretik dan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan persoalan epistemologis dan normatif dalam praktik penelitian pendidikan tinggi. Dalam literatur metodologi mutakhir, penelitian konseptual dipahami sebagai pendekatan yang sah dan relevan untuk mengkaji fenomena abstrak seperti paradigma penelitian, asumsi epistemologis, dan orientasi kebijakan ilmu pengetahuan (Snyder, 2019; Aliyu et al., 2022).

Data penelitian bersumber dari literatur sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur selektif dan sistematis terhadap artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Literatur yang dianalisis mencakup kajian tentang epistemologi penelitian, paradigma riset kualitatif dan post-positivistik, manajemen dan kepemimpinan pendidikan tinggi, inovasi universitas, serta kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan riset nasional. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan otoritas akademik, relevansi teoretik, dan kontribusinya dalam diskursus kontemporer pendidikan tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kajian literatur tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan pengetahuan, tetapi juga sebagai metode penelitian yang memungkinkan pengembangan sintesis teoretik dan perspektif baru (Snyder, 2019; Hallinger & Kovačević, 2021).

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik-kritis, dengan menelusuri dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dalam literatur terkait dominasi paradigma positivisme, keterbatasan epistemologisnya, serta potensi paradigma alternatif seperti post-positivistik, interpretatif, dan transformatif. Proses analisis mencakup pengkajian asumsi dasar yang melandasi pendekatan-pendekatan penelitian tersebut, khususnya dalam memaknai peran universitas, kepemimpinan akademik, dan hubungan antara riset, inovasi, serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Selanjutnya, dilakukan sintesis konseptual dengan mengaitkan temuan-temuan teoretik tersebut dengan konteks kebijakan pembangunan nasional dan agenda penguatan sumber daya manusia. Pendekatan sintesis ini bertujuan menghasilkan model konseptual yang koheren dan relevan secara kontekstual, sebagaimana direkomendasikan dalam pengembangan artikel konseptual di bidang manajemen dan pendidikan (Pratt, 2020; Jaakkola, 2020).

Keabsahan kajian dalam penelitian ini dijaga melalui validitas teoretik dan argumentatif, yang ditentukan oleh konsistensi logika, ketepatan penggunaan konsep, serta keterkaitan yang jelas antara argumen yang dibangun dan literatur rujukan. Karena bersifat konseptual, kualitas penelitian tidak diukur melalui reliabilitas instrumen atau validitas statistik, melainkan melalui kedalaman analisis, ketajaman refleksi kritis, dan kontribusi konseptual terhadap pengembangan wacana penelitian manajemen pendidikan tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan metodologis kontemporer yang menekankan bahwa penelitian kualitatif dan konseptual memperoleh legitimasi ilmiahnya dari kekuatan penalaran dan relevansi teoretik, bukan dari generalisasi statistik (Schwandt, 2019; Farquharson et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Positivisme dan Krisis Relevansi Penelitian Manajemen Pendidikan Tinggi

Dalam praktik penelitian manajemen pendidikan tinggi, paradigma positivisme selama ini menjadi kerangka dominan dalam memahami dan mengelola organisasi universitas. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa realitas organisasi bersifat stabil dan dapat direpresentasikan melalui indikator-indikator terukur, sehingga hubungan antarfenomena dapat dijelaskan melalui pola sebab-akibat yang bersifat linier. Tradisi tersebut mendorong penggunaan instrumen kuantitatif, seperti survei dan pengukuran kinerja, sebagai basis utama dalam menilai kepemimpinan, kepuasan pemangku kepentingan, dan efektivitas institusi.

Dalam batas tertentu, orientasi positivistik memberikan manfaat praktis bagi penguatan akuntabilitas dan tata kelola perguruan tinggi. Sistem pengukuran berbasis indikator memungkinkan universitas memenuhi tuntutan penjaminan mutu, akreditasi, serta pelaporan kinerja yang dibutuhkan dalam kerangka manajemen modern. Namun, ketika pendekatan ini digunakan secara dominan dan tidak disertai perspektif alternatif, muncul keterbatasan serius dalam menjelaskan universitas sebagai institusi akademik yang beroperasi melalui nilai, norma profesional, dan relasi kolegial yang kompleks.

Keterbatasan paradigma positivistik semakin terlihat ketika universitas dihadapkan pada mandat strategis untuk berkontribusi dalam inovasi, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Dalam konteks pembangunan berbasis pengetahuan, peran universitas melampaui fungsi penyedia tenaga kerja dan mencakup penciptaan pengetahuan, teknologi, serta nilai tambah ekonomi yang bersifat kontekstual. Relasi antara riset, kepemimpinan akademik, inovasi, dan pembangunan ekonomi daerah bersifat dinamis dan nonlinier, sehingga tidak dapat

direduksi ke dalam model analisis kausal sederhana yang menjadi ciri utama pendekatan positivistik.

Ketergantungan yang berlebihan pada paradigma positivisme juga berimplikasi pada cara penelitian manajemen pendidikan tinggi merumuskan rekomendasi kebijakan. Fokus yang terlalu kuat pada efisiensi internal dan indikator kinerja administratif cenderung menghasilkan rekomendasi teknokratis yang terbatas pada perbaikan prosedural. Akibatnya, penelitian kurang mampu menjelaskan proses transformasi kelembagaan universitas dan kontribusi substantifnya dalam mendorong inovasi serta penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal.

Sebaliknya, dalam perspektif epistemologi post-positivistik, organisasi pendidikan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi aktor, dinamika historis, serta pengaruh lingkungan kebijakan dan ekonomi. Pendekatan ini menempatkan kepemimpinan akademik, kolaborasi lintas aktor, dan proses inovasi sebagai fenomena yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui pengukuran formal semata. Oleh karena itu, dominasi paradigma positivisme dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi berpotensi mengaburkan dimensi-dimensi penting tersebut dan membatasi daya jelaskan penelitian terhadap realitas universitas yang sesungguhnya.

Kondisi tersebut menandai terjadinya krisis relevansi epistemologis, yakni situasi ketika penelitian manajemen pendidikan tinggi kehilangan keterkaitannya dengan kebutuhan transformasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, krisis ini tercermin pada lemahnya kontribusi penelitian dalam mendukung universitas sebagai penggerak inovasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan sumber daya manusia unggul. Tanpa reorientasi paradigma penelitian yang lebih kontekstual dan reflektif, penelitian manajemen pendidikan tinggi berisiko tetap terpisah dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kepemimpinan Akademik dan Transformasi Universitas Berbasis Potensi Lokal

Transformasi universitas menjadi pusat inovasi yang berakar pada pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal mensyaratkan bentuk kepemimpinan akademik yang melampaui fungsi administratif dan manajerial semata. Kepemimpinan akademik dalam konteks pendidikan tinggi berkaitan dengan kapasitas memengaruhi komunitas ilmiah melalui legitimasi keilmuan, kepercayaan kolegiat, serta komitmen terhadap misi institusi jangka panjang (Ramsden, 1998). Peran ini menjadi krusial ketika universitas dituntut mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar selaras dengan agenda pembangunan daerah dan nasional.

Dalam teori organisasi pendidikan tinggi, universitas dipahami sebagai *loosely coupled system* yang ditandai oleh tingkat otonomi profesional yang tinggi, struktur yang tidak sepenuhnya hierarkis, serta budaya akademik yang relatif otonom (Clark, 1983). Karakteristik tersebut menyebabkan perubahan kelembagaan tidak dapat digerakkan secara efektif melalui pendekatan birokratis atau mekanisme komando administratif. Oleh karena itu, pendekatan positivistik yang mereduksi kepemimpinan menjadi variabel individual yang terukur—seperti gaya atau perilaku pemimpin—kurang mampu menjelaskan dinamika transformasi universitas sebagai institusi berbasis nilai dan pengetahuan.

Dalam kerangka *distributed academic leadership*, kepemimpinan dipahami sebagai proses kolektif yang terdistribusi di berbagai level organisasi akademik, termasuk pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan peneliti (Bolden et al., 2009). Perspektif ini memberikan dasar konseptual yang lebih memadai untuk memahami bagaimana ekosistem inovasi universitas dapat

dibangun secara berkelanjutan. Kepemimpinan tidak lagi dipusatkan pada figur individual, melainkan diwujudkan melalui kolaborasi lintas aktor akademik dalam hilirisasi riset, pengembangan kewirausahaan, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan industri lokal.

Meskipun demikian, berbagai dokumen kebijakan menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan akademik dalam mengarahkan riset berbasis potensi lokal masih belum optimal. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mencatat bahwa sebagian besar penelitian perguruan tinggi masih berorientasi pada luaran publikasi ilmiah dan belum terhubung secara kuat dengan kebutuhan industri maupun pengembangan ekonomi daerah (Kemendikbudristek, 2021). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara agenda riset akademik dan kebutuhan pembangunan berbasis sumber daya alam lokal.

Temuan tersebut diperkuat oleh evaluasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara universitas, dunia usaha, dan pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu ekosistem inovasi yang berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2022). Banyak inisiatif kolaboratif berlangsung dalam kerangka proyek jangka pendek, sehingga belum mampu menghasilkan dampak struktural dalam pengembangan inovasi dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.

Dalam konteks ini, pendekatan epistemologis yang lebih reflektif dan kontekstual menjadi penting untuk memahami peran kepemimpinan akademik dalam transformasi universitas. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian manajemen pendidikan tinggi menangkap dinamika nonlinier antara kepemimpinan, budaya akademik, kolaborasi lintas aktor, dan inovasi berbasis sumber daya alam lokal. Dengan demikian, kepemimpinan akademik tidak lagi dipahami sebagai atribut individual yang dapat diukur secara terpisah, melainkan sebagai proses institusional yang menentukan kemampuan universitas dalam berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia unggul dan penguatan kemandirian ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Peluang dan Dukungan Kebijakan Pemerintah terhadap Reorientasi Riset Perguruan Tinggi

Krisis relevansi yang muncul akibat dominasi paradigma positivisme dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi secara paradoksal membuka ruang bagi pengembangan pendekatan epistemologis yang lebih kontekstual dan transformatif. Dalam kerangka post-positivistik, organisasi pendidikan tidak dipahami sebagai entitas netral yang sepenuhnya dapat direpresentasikan melalui indikator terukur, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai, budaya, relasi kekuasaan, dan interaksi antaraktor (Burrell & Morgan, 1979; Creswell, 2014). Perspektif ini menempatkan relevansi sosial dan kontribusi pembangunan sebagai kriteria penting dalam penilaian mutu riset pendidikan tinggi, sehingga mendorong perguruan tinggi untuk mereorientasikan agenda riset dan manajemennya.

Peluang Kebijakan: Ruang Reorientasi Riset Berbasis Kebutuhan Pembangunan

Dari sudut pandang kebijakan publik, terdapat peluang strategis bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan riset yang lebih terhubung dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah. Agenda nasional yang menekankan penguatan sumber daya manusia unggul, hilirisasi riset, serta pengelolaan sumber daya alam bernilai tambah menyediakan ruang kebijakan bagi universitas untuk mengintegrasikan riset, inovasi, dan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Dalam kerangka *Mode 2 knowledge production*, produksi pengetahuan diarahkan pada pemecahan

masalah nyata melalui kolaborasi lintas aktor, sehingga batas antara aktivitas akademik dan kebutuhan pembangunan menjadi semakin cair (Gibbons et al., 1994).

Meskipun demikian, berbagai evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh perguruan tinggi. Laporan kinerja riset nasional mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan penelitian masih berorientasi pada luaran publikasi ilmiah dan belum terhubung secara sistemik dengan kebutuhan industri maupun pengembangan ekonomi daerah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021). Kondisi ini mencerminkan bahwa peluang kebijakan yang tersedia masih berada pada tataran normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam strategi kelembagaan riset yang berkelanjutan.

Pada level global, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS dan G20 juga menciptakan peluang tambahan bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam diplomasi ekonomi, kolaborasi riset lintas negara, dan transfer teknologi. Agenda kerja sama internasional tersebut menempatkan riset terapan, inovasi, serta pengelolaan sumber daya alam bernilai tambah sebagai isu strategis, yang seharusnya dapat dimanfaatkan universitas sebagai pijakan dalam menyusun ulang prioritas risetnya.

Dukungan Kebijakan: Arahan Negara dan Penguatan Legitimasi Institusional

Selain peluang kebijakan yang bersifat struktural, terdapat pula dukungan kebijakan yang lebih eksplisit dari negara terhadap reorientasi riset perguruan tinggi. Pada awal Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada para rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia agar riset dan inovasi kampus diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, serta penciptaan nilai tambah ekonomi. Arahan tersebut menegaskan posisi riset perguruan tinggi sebagai instrumen strategis negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan tinggi, arahan tersebut memberikan legitimasi politik dan institusional bagi perguruan tinggi untuk melakukan perubahan orientasi riset. Dukungan negara tercermin dalam penguatan skema pendanaan riset terapan, dorongan kolaborasi universitas-industri, serta integrasi riset dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. Dengan adanya payung kebijakan yang lebih kuat, reorientasi riset tidak lagi bergantung pada inisiatif individual atau kepemimpinan lokal semata, tetapi memperoleh dasar legitimasi yang lebih kokoh dari negara.

Dukungan kebijakan ini sekaligus mempertegas keterbatasan pendekatan positivistik dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi. Pendekatan yang berfokus pada pengukuran kinerja administratif dan kepatuhan prosedural menjadi kurang memadai untuk menjawab mandat riset yang menuntut dampak langsung pada pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Sebaliknya, paradigma penelitian yang bersifat transformatif dan berorientasi pada pemecahan masalah lebih selaras dengan arah kebijakan negara dan peran baru universitas sebagai pusat inovasi.

Implikasi bagi Reorientasi Paradigma Penelitian

Dengan demikian, peluang dan dukungan kebijakan pemerintah membentuk konteks strategis bagi reorientasi paradigma penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia.

Peluang kebijakan menyediakan ruang eksperimentasi dan inovasi kelembagaan, sementara dukungan kebijakan memberikan legitimasi serta keberlanjutan bagi perubahan

tersebut. Dalam konteks ini, adopsi paradigma alternatif dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi tidak hanya merupakan respons akademik terhadap krisis epistemologis, tetapi juga respons strategis terhadap arah kebijakan negara.

Reorientasi paradigma penelitian yang mampu mengintegrasikan kepemimpinan akademik, kolaborasi lintas aktor, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal berpotensi memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan kemandirian ekonomi nasional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian manajemen pendidikan tinggi dapat berfungsi sebagai instrumen refleksi kritis sekaligus pengarah transformasi universitas menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.

Universitas, Inovasi, dan Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sumber Daya Alam Lokal

Universitas yang memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan pembangunan tidak cukup berfokus pada penyesuaian kurikulum dengan struktur pasar kerja yang telah ada. Lebih dari itu, universitas dituntut berperan aktif dalam membentuk dinamika ekonomi baru melalui produksi pengetahuan, inovasi, dan kewirausahaan. Dalam kerangka pembangunan berbasis pengetahuan, universitas diposisikan sebagai simpul utama yang menghubungkan riset, teknologi, dan nilai tambah ekonomi, sehingga kontribusinya tidak hanya tercermin pada penyerapan lulusan, tetapi juga pada kemampuan menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan (Gibbons et al., 1994).

Potensi tersebut terutama relevan bagi konteks Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman ekonomi lokal. Melalui riset terapan, transfer teknologi, dan pengembangan kewirausahaan berbasis potensi daerah, universitas memiliki kapasitas untuk mendorong lahirnya kegiatan ekonomi bernilai tambah di sektor-sektor strategis berbasis sumber daya alam. Namun, kapasitas ini sulit diaktualisasikan apabila penelitian manajemen pendidikan tinggi masih didominasi oleh orientasi efisiensi internal dan indikator kinerja akademik yang bersifat administratif.

Dominasi paradigma positivistik dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi cenderung mereduksi kinerja universitas ke dalam ukuran kuantitatif seperti tingkat kelulusan, jumlah publikasi, dan status akreditasi. Dalam perspektif filsafat ilmu, orientasi semacam ini merepresentasikan rasionalitas instrumental yang memandang universitas sebagai objek pengelolaan birokratis, bukan sebagai subjek transformasi sosial dan ekonomi. Akibatnya, relasi antara riset, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja baru—terutama yang berbasis potensi lokal—kurang terartikulasikan secara memadai dalam kerangka analisis penelitian.

Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi dan riset nasional memperkuat gambaran tersebut. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa pada periode 2022–2023, luaran riset perguruan tinggi masih didominasi oleh publikasi akademik, sementara proses hilirisasi riset dan pengembangan usaha baru berbasis potensi lokal belum menunjukkan capaian yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem riset nasional belum sepenuhnya diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang kuat di tingkat daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan evaluasi pasar tenaga kerja nasional yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Data periode 2022–2024 menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi masih lebih banyak berperan sebagai pencari kerja (*job seekers*), sementara kontribusi mereka sebagai pencipta lapangan kerja (*job creators*) relatif terbatas. Evaluasi tersebut juga menyoroti adanya *skill mismatch* antara kompetensi lulusan dan kebutuhan

industri, khususnya pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang menuntut inovasi teknologi dan kapasitas kewirausahaan (Kemnaker RI, 2023; 2024).

Dalam perspektif epistemologis, kondisi tersebut mencerminkan keterbatasan paradigma positivistik dalam memahami universitas sebagai agen pembangunan. Positivisme cenderung mengasumsikan hubungan linier antara peningkatan kinerja akademik dan dampak ekonomi, tanpa mempertimbangkan kompleksitas konteks sosial, budaya, serta ekosistem inovasi yang melingkupi universitas. Sebaliknya, paradigma alternatif—seperti post-positivistik dan transformatif—memandang universitas sebagai institusi yang berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial-ekonomi, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai peran riset dalam menciptakan struktur ekonomi baru berbasis potensi lokal.

Dengan demikian, reorientasi paradigma penelitian manajemen pendidikan tinggi menjadi prasyarat bagi penguatan peran universitas dalam penciptaan lapangan kerja berbasis sumber daya alam lokal. Pergeseran dari paradigma positivistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan transformatif memungkinkan penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja institusi, tetapi juga sebagai instrumen analitis yang mengarahkan kontribusi universitas terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia unggul dan penciptaan lapangan kerja baru menuju Indonesia Emas 2045.

Landasan Normatif Pembangunan Nasional dan Implikasi Epistemologis bagi Riset Perguruan Tinggi

Transformasi universitas di Indonesia berlangsung dalam kerangka visi pembangunan nasional yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif dan ideologis. Asta Cita Pemerintahan 2024–2029 merefleksikan orientasi negara untuk menempatkan kemandirian bangsa—khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam—sebagai dasar kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka tersebut, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi diposisikan sebagai prasyarat utama agar Indonesia mampu keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan membangun struktur ekonomi bernilai tambah secara berkelanjutan.

Berbeda dari kebijakan sektoral yang bersifat operasional, Asta Cita berfungsi sebagai kerangka nilai yang memberikan arah filosofis bagi pembangunan nasional, termasuk pembangunan pendidikan tinggi. Orientasi ini membawa implikasi langsung bagi cara pandang terhadap peran universitas. Universitas tidak lagi dipahami semata sebagai institusi pendidikan formal dan penghasil lulusan, melainkan sebagai instrumen strategis negara dalam membangun kapasitas inovasi, kemandirian ekonomi, dan daya saing nasional. Konsekuensinya, penelitian di perguruan tinggi dituntut untuk berkontribusi secara nyata terhadap agenda pembangunan tersebut.

Dalam perspektif filsafat ilmu, orientasi pembangunan yang menekankan kemandirian dan penciptaan nilai tambah menantang dominasi paradigma positivistik dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi. Paradigma positivisme yang berfokus pada pengukuran kinerja internal, efisiensi administratif, dan kepatuhan prosedural cenderung kurang memadai untuk menjelaskan peran universitas dalam proyek kebangsaan yang bersifat transformasional. Pendekatan tersebut memosisikan pengetahuan sebagai objek pengukuran, bukan sebagai sarana perubahan sosial dan ekonomi.

Sebaliknya, paradigma penelitian yang bersifat kontekstual dan transformatif menawarkan kerangka epistemologis yang lebih selaras dengan visi pembangunan nasional. Paradigma ini memandang pengetahuan sebagai proses yang terikat pada konteks sosial, ekonomi, dan politik, serta berorientasi pada pemecahan persoalan nyata yang dihadapi bangsa. Dalam konteks Asta Cita, pendekatan epistemologis semacam ini memungkinkan penelitian manajemen pendidikan tinggi berfungsi sebagai instrumen refleksi kritis sekaligus pengarah transformasi universitas.

Dengan demikian, integrasi Asta Cita 2024–2029 dalam kajian penelitian manajemen pendidikan tinggi tidak dimaksudkan untuk mengulang diskursus peluang atau dukungan kebijakan yang bersifat operasional. Integrasi tersebut bertujuan menegaskan landasan normatif dan filosofis yang melandasi kebutuhan pergeseran paradigma penelitian. Dalam konteks ini, transformasi paradigma penelitian manajemen pendidikan tinggi merupakan konsekuensi logis dari arah pembangunan nasional yang menempatkan universitas sebagai aktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan penguatan kemandirian ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Model Konseptual Transformasi Perguruan Tinggi

Model konseptual yang dikembangkan dalam artikel ini dirancang sebagai respons teoretik terhadap krisis relevansi paradigma positivisme dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia. Selama beberapa dekade, paradigma positivistik mendominasi kajian manajemen pendidikan melalui asumsi keterukuran, generalisasi, dan hubungan sebab–akibat linier. Dominasi tersebut mendorong pemaknaan perguruan tinggi terutama sebagai entitas administratif yang kinerjanya dinilai melalui indikator kuantitatif, seperti efisiensi internal, akreditasi, dan luaran publikasi. Dalam perspektif sosiologi ilmu dan organisasi, pendekatan semacam ini memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada universitas yang beroperasi sebagai sistem sosial berbasis nilai, budaya akademik, dan otonomi profesional (Burrell & Morgan, 1979; Clark, 1983).

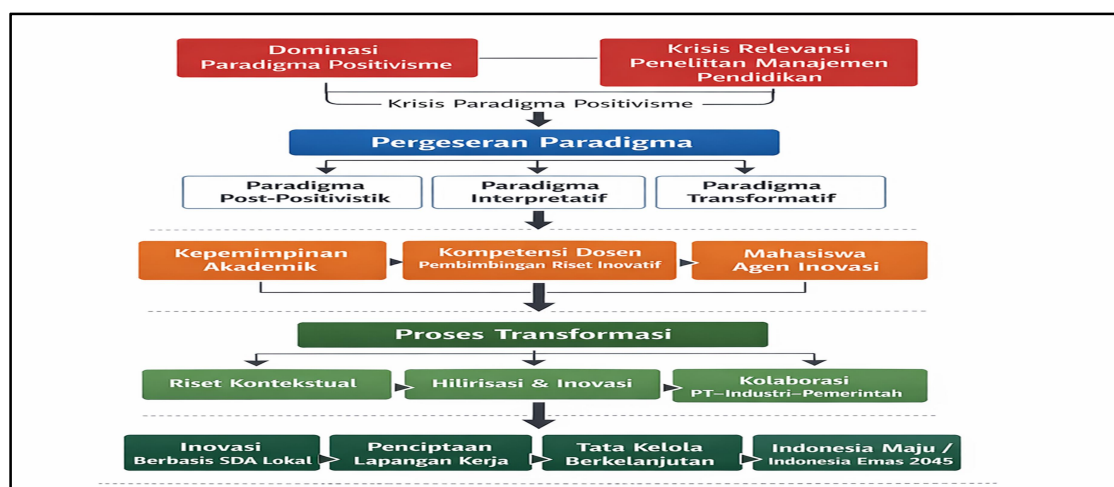
Secara epistemologis, model ini berangkat dari kritik terhadap pemisahan antara produksi pengetahuan dan konteks sosial yang menjadi ciri utama positivisme. Dalam kerangka post-positivistik dan interpretatif, realitas organisasi pendidikan dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara aktor, kepemimpinan akademik, dan lingkungan kebijakan yang melingkupinya (Creswell, 2014). Pergeseran perspektif ini memungkinkan penelitian manajemen pendidikan tinggi bergerak melampaui fungsi pengukuran kinerja menuju pemahaman reflektif atas proses perubahan kelembagaan dan relasinya dengan agenda pembangunan.

Model konseptual ini selanjutnya memosisikan perguruan tinggi sebagai aktor strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, khususnya melalui inovasi dan penciptaan nilai tambah yang bersumber dari potensi sumber daya alam lokal. Dalam kerangka *Mode 2 knowledge production*, pengetahuan diproduksi secara kontekstual, lintas disiplin, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan negara (Gibbons et al., 1994). Pendekatan ini menegaskan bahwa riset perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi, serta harus terhubung dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan kebijakan publik.

Pada tataran kelembagaan, model ini menekankan pentingnya kepemimpinan akademik dan kompetensi dosen sebagai penggerak utama transformasi universitas. Kepemimpinan akademik dipahami sebagai proses kolektif dan terdistribusi yang membangun legitimasi

intelektual, visi bersama, dan budaya inovasi di dalam komunitas akademik (Ramsden, 1998; Bolden et al., 2009). Dalam konteks ini, dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar dan peneliti, tetapi juga sebagai pembimbing riset inovatif yang memfasilitasi mahasiswa menghasilkan karya yang memiliki nilai guna bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, model konseptual ini menegaskan bahwa krisis paradigma positivisme dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi bukan sekadar persoalan metodologis, melainkan persoalan epistemologis yang berimplikasi langsung pada arah pembangunan pendidikan tinggi. Paradigma positivistik yang berfokus pada rasionalitas instrumental cenderung mengabaikan dimensi transformatif pendidikan, sementara paradigma alternatif—khususnya paradigma transformatif—memandang penelitian sebagai instrumen perubahan sosial dan kelembagaan (Mezirow, 1997). Adopsi paradigma penelitian yang lebih reflektif dan kontekstual menjadi prasyarat bagi perguruan tinggi Indonesia untuk berkontribusi secara bermakna dalam pembangunan sumber daya manusia unggul, penguatan inovasi berbasis potensi lokal, dan pencapaian tujuan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 1. Model Konseptual Transformasi Perguruan Tinggi sebagai Respons Terhadap Krisis Paradigma Positivisme dalam Penelitian Manajemen Pendidikan

Sumber: diolah penulis menggunakan AI berdasarkan Burrell & Morgan (1979); Clark (1983); Gibbons et al. (1994); Creswell (2014); Ramsden (1998); Bolden et al. (2009); Mezirow (1997).

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa dominasi paradigma positivisme dalam penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia telah melahirkan persoalan relevansi epistemologis. Orientasi penelitian yang berfokus pada pengukuran kinerja administratif dan indikator kuantitatif terbukti kurang memadai untuk menjelaskan peran strategis perguruan tinggi dalam dinamika pembangunan nasional. Pendekatan positivistik yang bertumpu pada asumsi kausal linier dan objektivitas instrumen cenderung menyederhanakan kompleksitas perguruan tinggi sebagai institusi sosial, akademik, dan ekonomi yang beroperasi dalam konteks nilai, kepemimpinan, serta kebutuhan masyarakat.

Melalui kajian konseptual-kritis, artikel ini menunjukkan bahwa paradigma alternatif—khususnya post-positivistik, interpretatif, dan transformatif—menyediakan landasan

epistemologis yang lebih sesuai untuk memahami dan mengarahkan transformasi perguruan tinggi. Paradigma tersebut memungkinkan penelitian manajemen pendidikan tinggi melampaui fungsi deskriptif dan evaluatif, menuju peran yang lebih reflektif dalam menjelaskan proses perubahan kelembagaan serta merumuskan arah pengembangan universitas yang kontekstual.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengajuan model konseptual transformasi perguruan tinggi sebagai respons terhadap krisis paradigma positivisme. Model ini mengintegrasikan pergeseran paradigma penelitian, kepemimpinan akademik, kompetensi dosen dalam pembimbingan riset inovatif, serta keterlibatan mahasiswa sebagai aktor pembelajaran dan inovasi. Dengan memosisikan perguruan tinggi sebagai aktor strategis pembangunan, model tersebut memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana universitas dapat berkontribusi dalam inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam lokal berbasis pengetahuan.

Lebih jauh, simpulan ini menegaskan bahwa reorientasi paradigma penelitian manajemen pendidikan tinggi bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan kebutuhan strategis yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi pembangunan jangka panjang Indonesia. Perguruan tinggi yang mampu mengadopsi paradigma penelitian alternatif dan menerjemahkannya ke dalam praktik kelembagaan berpotensi menghasilkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat, mendukung tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul.

Sebagai implikasi teoretik dan praktis, artikel ini merekomendasikan agar agenda penelitian manajemen pendidikan tinggi di Indonesia secara lebih sadar dan reflektif mengadopsi paradigma alternatif dalam perumusan desain riset, pengembangan kepemimpinan akademik, dan penguatan kompetensi dosen dalam pembimbingan riset mahasiswa. Penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris model konseptual yang diajukan dalam berbagai konteks perguruan tinggi dan wilayah di Indonesia, sehingga kontribusi keilmuan dan kebijakan yang dihasilkan semakin relevan dalam mendukung pencapaian Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyu, M. S., Zubairu, U. B., & Bakar, A. R. A. (2022). Conceptual paper: Its role, structure, and development. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 14(5), 1229–1242. <https://doi.org/10.1108/JARHE-08-2021-0273>
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Bolden, R., Petrov, G., & Gosling, J. (2009). Distributed leadership in higher education: Rhetoric and reality. *Educational Management Administration & Leadership*, 37(2), 257–277. <https://doi.org/10.1177/1741143208100301>
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological paradigms and organisational analysis*. London: Heinemann.
- Clark, B. R. (1983). *The higher education system: Academic organization in cross-national perspective*. Berkeley: University of California Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fattah, N. (2019). *Manajemen pendidikan berbasis kinerja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Farquharson, L., Thornton, S., & Yu, S. (2020). Supporting methodological quality in conceptual qualitative research: A social science perspective. *Qualitative Inquiry*, 26(8), 1016–1026. <https://doi.org/10.1177/1077800419833370>
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). *The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies*. London: Sage.
- Hallinger, P., & Kovačević, J. (2021). A bibliometric review of research on educational leadership and management in education journals, 2000–2020. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(1), 6–30. <https://doi.org/10.1177/1741143220972220>
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kondisi ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Outlook ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja riset dan inovasi nasional*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Evaluasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. *Adult Education Quarterly*, 47(1), 5–12. <https://doi.org/10.1177/074171369704700102>
- Prasojo, L. D. (2018). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Pratt, M. G. (2020). The problem of meaning in management research: Lessons from a long and frustrated search. *Academy of Management Review*, 45(3), 553–571. <https://doi.org/10.5465/amr.2018.0192>
- Ramsden, P. (1998). *Learning to lead in higher education*. London: Routledge.
- Schwandt, T. A. (2019). *The SAGE dictionary of qualitative inquiry* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yamin, M. (2021). *Paradigma baru pembangunan sumber daya manusia Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.